

Rekrutmen Calon Kepala Daerah Melalui Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012

(STUDI KASUS PAN BAUBAU)

Mustama, Suranto

Program Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Email: mustamalaode@yahoo.co.id

Abstrak-Proses rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Sulawesi Tenggara Tahun 2012 karena adanya kasus yang unik *pertama*, yaitu penyogokan ketua KPU untuk diloloskan sebagai calon Kepala Daerah Kota Baubau. *Kedua*, mengarahkan PNS Kabupaten Buton sebanyak 3600 orang yang berdomisili di Kota Baubau untuk memilih dan memenangkan pasangan nomor urut 2 yaitu Drs. Tamrin, MH dan Waode Maasra S. Sos., M. Si, dan para PNS tersebut kemudian terlibat langsung dalam mengarahkan masyarakat dan membagi-bagikan uang secara terang-terangan dengan ajakan kepada masyarakat diseluruh kelurahan Kota Baubau. Tujuan dalam penelitian ini yaitu [1]. menganalisa bagaimana rekrutmen (PAN) Kota Baubau, [2]. menganalisa faktor yang menyebabkan (PAN) untuk mengusung Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan pendekatan pada kenyataan yaitu data primer dan data sekunder. yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui partai politik (PAN) Kota Baubau Sulawesi Tenggara Tahun 2012, sudah berjalan dengan optimal meskipun ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut, yaitu (a). Dilihat dari finansialnya (Indikator Topeng), (b). Dilihat dari kualitas pengalaman kerjanya, (Indikator Kinerja). Meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen calon kepala daerah Kota Baubau diatas namun ada faktor yang mendukungnya yaitu, (a). Dukungan pengurus dari DPD, DPW, dan DPP, (b). Tim-tim pemenang dari luar yang mampu meyakinkan calon tersebut, (c). *sociol backgroundnya* (d). Political Socialization (e). Initial Political Activity (f). Apprenticeship (g). Occupational Variabels (h). Motivation.

Kata Kunci : *Pilkada, Parpol, Rekrutmen, Kepala, Daerah*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung telah dilaksanakan sejak Juni 2005 di lebih dari 200 Daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi) di Indonesia. Pilkada merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia setelah berhasil

menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2004¹.

Melalui pemilihan secara langsung atas Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka kini, sekurang-kurangnya secara prosedural, Kedaulatan Politik benar-benar berada di tangan rakyat. Melalui pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin eksekutif Daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD. Namun sejauh mana Kepala-kepala Daerah hasil Pilkada sungguh-sungguh bertanggung jawab dan berpihak kepada aspirasi dan kepentingan rakyat, barangkali masih merupakan pertanyaan besar. Begitu pula, kualitas demokrasi dan tata-pemerintahan daerah hasil pilkada, mungkin masih memerlukan waktu untuk mengevaluasi dan menilainya.

Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 29 september 2012 untuk periode 2013-2018 pada pilkada yang diselenggarakan KPU Baubau diikuti oleh 6 pasangan calon yang bertarung pada pemilukada tersebut, berikut nama-nama pasangan calon diantaranya:

1. Pasangan no urut 1 yaitu, Drs. H Faimuddin dan Arifudin, Sos yang diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
2. Pasangan no urut 2 yaitu, Drs. H. S. Tamrin, MH dan Wa ode Maasra Manarfa, S. Sos, M.Si yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN)
3. Pasangan calon no urut 3 yaitu, Sairu Eba, SE dan Drs. La Ode Hadia, M.Si yang diusung oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR),
4. Pasangan calon no urut 4 yaitu, Drs. H.Ibrahim Marsela, MM dan Drs. Drs. H.Muirun Awi, M. Si yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),

¹ (Jurnal Dirjen Otonomi Daerah, 28 juni 2006.)Diakses, tgl 2 maret, 2015.

5. Pasangan calon no urut 5 yaitu, Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail yang diusung Partai Bulan Bintang (PBB)
6. Pasangan calon no urut 6 yaitu, Drs. MZ Amirul Tamim, M.Si dan Agus Faisal Hidayat, S.Sos., M.Si yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP)²

Enam pasangan calon tersebut, yang menggugat ke MK, yaitu pasangan calon no urut 6 dengan permasalahan atau pokok-pokok yang kami permasalahan. Bahwa dalam hal ini, kami mendalilkan bahwa yang pertama, ada keberpihakan Termohon pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dan yang kedua, ada politisasi birokrasi secara terstruktur, dan sistematis, serta masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2³.

Bahwa mengenai keberpihakan, kami menjelaskan bahwa dalam penetapan pasangan calon nomor urut 2 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau adalah Termohon telah mencederai demokrasi dan melakukan pelanggaran yang serius dan signifikan yang mempengaruhi hasil perolehan suara para pasangan calon peserta pemilukada, terutama keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yakni, meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012, yang mana Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Drs. A. S. Tamrin, M.H. dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si. Sementara diketahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012.

Bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 yang tidak memenuhi salah satu persyaratan, untuk menjadi peserta dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, yaitu syarat kesehatan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Yang menentukan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter, selain itu juga pasangan calon no urut 2 telah melakukan pelanggaran yaitu menyogok ketua KPU Baubau dan mengarahkan PNS Kabupaten Buton untuk membagi-bagikan uang secara terang-terangan.

Dengan kenyataan itu maka sangat diharapkan proses rekrutmen calon Kepala Daerah Kota Baubau melalui partai (PAN) perlu mensyaratkan setiap calon

memiliki integritas, kualitas, bersih, jujur dan loyal dalam arti positif kepada partai pengusung. Yang dicalonkan tidak harus kader partai tetapi terbuka untuk menjadi anggota partai baik apabila terpilih maupun tidak. Pada masa mendatang, Kepala Daerah menjadi jalur yang pasti untuk rekrutment pemimpin nasional baik eksekutif maupun legislatif sehingga peran partai politik dalam mempersiapkan calon-calon kepala daerah tidak seperti dulu lagi. DPP Partai yang memiliki hak veto dalam menentukan calon kepala daerah harus memperhatikan sungguh-sungguh calonnya sehingga calon tersebut dapat menjadi aset partai di masa depan.

Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 maka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL I.

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012

Nomor Urut	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	persentase
1	Drs. H. Faimuddin dan Arifuddin, S.Sos	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.286	1,79
2	Drs. A. S. Tamrin, MH dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si	PARTAI AMANAT NASIONAL	26.105	36,43
3	Sairu Eba, SE Dan Drs. La Ode Hadia, M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.087	1,52
4	Drs. H. Ibrahim Marsela, MM dan Drs. H. Muirun Awi, M.Si	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11.421	15,94
5	Drs. La Ode Mustari, M.Si dan Ikhsan Ismail	PARTAI BULAN BINTANG	11.216	15,65
6	Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si dan	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	20.526	28,66

² (<http://kpu.baubaukota.go.id>).

³ (MahkamaKonstitusi.go.id). diakses tanggal 29 juni 2015, pukul 2:54

Nomor Urut	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara	Persentase
	Agus Feisal Hidayat, S.Sos, M.Si			

Sumber: (Mahkam Konstitusi.go.id). diakses, tanggal 17 juni 2015, pukul 14:12.

Berdasarkan tabel perolehan suara di atas, maka yang memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau pada tahun 2012 yaitu pasangan calon no urut 2, memperoleh suara sebanyak 26.105 dan persentase mencapai 36,43. Bahwa penetapan Calon Terpilih dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 8 November 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 Nomor 43/BA/KPU-BB/027.433614/XI.2012 tanggal 8 November 2012 (bukti T-18) dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 74/Kpts/KPU - Kota - 027.433614/KWK/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Terpilih Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 tanggal 8 November 2012 (bukti T-19)⁴. Sedangkan rekapitulasi hasil perolehan kursi partai politik dalam pemilu anggota DPRD Kota Baubau 2009 Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tabel berikut:

TABEL II.

Rekapitulasi Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota Dprd Kota Baubau 2009 Provinsi Sulawesi Tenggara

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI			
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI DasDem	1	-	1	2
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	-	1	2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	-	-	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA	-	-	1	1

⁴ (Mahkam Konstitusi.go.id). diakses, tanggal 17 juni 2015, pukul 14:12

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI			
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	JUMLAH
	ESIA PERJUANGAN				
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	-	-	1
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	1	-	2
7	PARTAI DEMOKRAT	1	1	1	3
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	2	1	5
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1	-	2
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1	1	3
11	PARTAI BULAN BINTANG	1	1	1	3
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-	-	-	0
	JUMLAH	11	7	7	25

Sumber: (<http://kpu.baubaukota.go.id>). Diakses, tanggal 19 juni 2015, pukul 5:41.

Berdasarkan tabel di atas rekapitulasi perolehan suara pemilihan legislatif tahun 2009 yang memperoleh kursi terbanyak adalah PAN sebanyak 5 kursi dibandingkan partai-partai lain. Jadi PAN sudah berhasil dalam mengatur dalam merekrut orang-orang berloyalitas kepada partai. Sementara, idealnya meskipun rekrutmen calon kepala daerah sudah melakukan pengawasan, tp masih ada kasus fatal yang dilakukan oleh anggota Partai Amanat Nasional (PAN) dengan kasus yang terjadi saat ini adalah kasus calon Kepala Daerah Kota Baubau periode 2013-2018 melalui Partai Amanat Nasional yaitu Drs. A.S. Tamrin. MH, bahwa diduga menyogok ketua KPU untuk diloloskan dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau.⁵

⁵ Kendari-pos 2013). Diakses, tgl 17 juni 2015, pukul 11:02.

Drs. A. S. Tamrin. MH. Sebagai mantan Direktur Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Kelembagaan pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) eselon II dari sejak tahun 2009 lalu. Namun pulang kekampung halamannya yaitu Baubau (Buton) untuk mencalonkan diri menjadi calon Kepala Daerah (walikota) Kota Baubau.

Pada tanggal 23/2/2013, sejumlah media swasta Kota Baubau dan Kendari mendatangi ketua KPU Baubau yaitu Dian Anggraini dimintai keterangan terkait masalah penyogokan atas pencalonan Drs. A.S. Tamrin. MH, sebagai calon Kepala Daerah (Walikota) Baubau tersebut. Namun ketua KPU tersebut tidak memberikan tanggapan dalam permasalahan itu, karna kami sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sewenang-wenang melakukan seperti itu.⁶

Sedangkan beberapa orang saksi dalam penyogokan tersebut di mintai keterangan, saksinya termasuk anggota KPU sendiri yaitu La ode Ijidman, Edi Sabara dan anggotanya yang lain. Partai Amanat Nasional (PAN) setelah mendengar ada kasus yang di alami oleh calon walikota tersebut sempat terguncang karena dengan kasus tersebut bisa merusak nama baik Partai, sampai saat ini belum ditindak lanjuti oleh pihak terkait dengan permasalahan tersebut.(Armin)⁷

Permasalahan yang kedua yaitu, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2012 dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Drs. HS Thamrin MH. dan Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos., M.Si. Bersama tim pemenangannya yang dilakukan dengan cara melibatkan dan menggerakkan unsur PNS dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diusung oleh 3 parpol yang salah satunya adalah Partai Amanat Bangsa atau PAN. Yang mana Ketua DPD PAN Kabupaten Buton yaitu Syamsu Umar Abdul Samiun, S.H., yang juga adalah sebagai Bupati Buton adalah telah menggunakan kekuasaannya dan pengaruhnya untuk menggerakkan birokrasi dengan cara mengarahkan PNS Kabupaten Buton sebanyak 3600 orang, yang berdomisili di Kota Baubau untuk memilih dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 dan para PNS tersebut kemudian terlibat langsung mengarahkan masyarakat dan ada yang membagikan uang kepada masyarakat dengan jalan terang-terangan dengan ajakan kepada masyarakat di seluruh kelurahan kota Baubau.⁸

Koirudin mengatakan bahwa:

⁶ *Kendari-pos 2013*). Diakses, tgl 17 juni 2015, pukul 11:02.

⁷ *Kendari-pos 2013*). Diakses, tgl 17 juni 2015, pukul 11:02.

⁸ (*mahkamahkonstitusi.go.id*). Diakses, tanggal 17 juni 2015, pukul 17:21.

“Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat”. Koirudin (2004:99) Sedangkan yang dikemukakan Stiftung bahwa :

“Rekrutmen Politik adalah secara luar biasa ditujukan bagi orang-orang dengan kualifikasi khusus. Rekrutmen luar biasa ditujukan kepada pakar atau kepada orang-orang yang dinilai memiliki jasa yang besar bagi partai politik. Karena direkrut secara luar biasa, mereka dengan kualifikasi khusus tidak harus mengikuti seleksi berjenjang sesuai dengan tingkatan keanggotaan. Selain itu partai politik juga perlu merekrut para tenaga profesional yang diharapkan dapat menata manajemen organisasi, dan pengembangan yang bersifat strategis”. Stiftung (2001:28)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui PAN pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Baubau Sulawesi Tenggara Tahun 2012 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui Partai Politik (PAN) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Baubau Sulawesi Tenggara Tahun 2012 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara umum peneliti bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa tentang rekrutmen calon kepala daerah melalui partai politik (PAN) pada pemilihan Kepala Daerah di Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012. Namun secara khusus, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menggambarkan dan menganalisa bagaimana rekrutmen partai Amanat Nasional (PAN) dalam mengusung Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisa faktor yang menyebabkan partai Amanat Nasional (PAN) untuk mengusung Calon Kepala Daerahnya pada pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012.

b. Manfaat Penelitian.

a. Manfaat Akademi.

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat bagaimana rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui Partai Amanat Nasional (PAN) yang terbangun menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012.
2. Memperkaya *keasanah* kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan utamanya dalam bidang rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui Partai Politik

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dalam memahami tentang rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui Partai Poliotik (PAN).
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain.

D. Kajian Pustaka

Dalam setiap melakukan penelitian, kajian pustaka mempunyai fungsi membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti. Sehingga pada dasarnya, kajian pustaka mempunyai fungsi untuk menjelaskan hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2015), dengan judul “ *Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah Provinsi Riau Oleh Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013*”. Hasil penelitian tentang rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah Propinsi Riau Tahun 2013, adalah, (1) dalam merekrut bakal calon Kepala Daerah, PKS mengajukan 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon, yaitu: dukungan politik, dukungan finansial dan dukungan social. (2) pada pemenuhan dukungan finansial, PKS tidak menetapkan jumlah dana kepada bakal calon Kepala Daerah seperti yang diisukan diluar, melainkan PKS mengajukan proposal yang berisi program pemenangan. (3) Dari 5 (lima) bakal calon yang diseleksi, PKS menetapkan memberikan dukungan kepada Jon Erizal untuk maju pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahrurozi (2013) dengan judul” *Rekrutmen politik bakal calon kepala daerah dan wakil Kepala daerah oleh partai keadilan sejahtera di kota Pekanbaru tahun 2011*”. Hasil penelitian ini adalah tentang Rekrutmen Politik Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru Tahun 2011, adalah (1) Prinsip umum yang mendasari rekrutmen politik partai ini sesuai dengan prinsip kelahirannya yaitu pembentukan partai dalam melakukan perbaikan pada sistem politik dan pemerintahan. Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera dalam proses rekrutmen politik yaitu, tahapan sertifikasi, tahapan penominasian, dan tahapan pemilu. (2) Selain dalam undang-undang ada tiga Pertimbangan partai keadilan sejahtera dalam menentukan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah : (a) Dukungan politik adalah dukungan partai politik, dapat memenuhi kekurangan suara partai keadilan sejahtera untuk mengusung satu pasangan calon. (b) Dukungan sosial adalah bahwa bakal calon harus cukup di kenal di masyarakat, tidak hanya orang sektarnya saja. (c) Dukungan finansial adalah dukungan pendanaan yang di gunakan saat melakukan sosialisasi dan pelaksanaan pemilukada. (3) Partai keadilan sejahtera sebagai partai menengah yang cukup berprestasi di Provinsi Riau, dalam menetapkan pasangan bakal calon kepala daerah tidak menggunakan aturan baku. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera adalah sistem rekrutmen terbuka. (4) Proses pengambilan keputusan rekrutmen politik bakal calon Walikota dan Wakil Walikota di lakukan dengan membentuk tim khusus yang berfungsi menyeleksi dan menjalin komunikasi dengan beberapa bakal calon, Tim penyeleksi melakukan penyeleksian dan komunikasi politik dengan bakal calon untuk mendapatkan lima nama bakal calon terbaik dari yang ada. Setelah melakukan komunikasi dan pendekatan kepada bakal calon Walikota, dewan pimpinan daerah melaksanakan rapat dengan setruktur partai. Hasil rapat dengan seluruh struktur partai terpilihah dua nama kandidat yang akan di sampaikan kepada dewan pimpinan pusat melalui dewan pimpinan wilayah. Melalui beberapa pertimbangan dan masukan-masukan dari pengurus partai di daerah dewan pengurus pusat menetapkan satu nama calon yang akan di usung dalam pemilukda.

E. Kerangka Teoritik

a. Rekrutmen Politik

Istilah rekrutmen berasal dari kata dasar “rekrut” yang artinya proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga tertentu termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan Kekuasaan Politik.

Menurut Rahman (2007:246) bahwa “Rekrutmen politik berasal dari dua kata yaitu Rekrutmen dan Politik. Rekrutmen berarti

penyeleksian dan politik berarti urusan negara, jadi rekrutmen Politik bisa diartikan suatu proses penyeleksian warga negara untuk ditempatkan pada lembaga Negara guna mengurus urusan negara melalui proses yang telah dirumuskan, proses penyeleksian dimana setiap warga yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu berhak untuk menempati posisi di lembaga negara.

Sedangkan Koirudin (2004:99) mengatakan bahwa:

“Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat”.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka bisa disimpulkan Rekrutmen politik adalah proses menarik dan mengajak orang untuk menjadi anggota partai politik dan aktif dalam kegiatan politik, proses rekrutmen politik meliputi metode rekrutmen, sumber perekrutan dan cara seleksi, sehingga anggota partai politik yang telah direkrut benar-benar berkualitas dan membawa kemajuan.

Sebagaimana Stiftung (2001:28) mengemukakan bahwa :

“Rekrutmen Politik adalah secara luar biasa ditujukan bagi orang-orang dengan kualifikasi khusus. Rekrutmen luar biasa ditujukan kepada pakar atau kepada orang-orang yang dinilai memiliki jasa yang besar bagi partai politik. Karena direkrut secara luar biasa, mereka dengan kualifikasi khusus tidak harus mengikuti seleksi berjenjang sesuai dengan tingkatan keanggotaan. Selain itu partai politik juga perlu merekrut para tenaga profesional yang diharapkan dapat menata manajemen organisasi, dan pengembangan yang bersifat strategis”.

Jadi dari pendapat Stiftung dapat dimengerti bahwa dalam merekrut orang yang profesional/ahli di bidang tertentu tidak selalu harus mengikuti seleksi, karena anggota yang profesional ini diharapkan mampu memberikan pengaruh positif seperti peran, hak, kewajiban, tanggungjawab, dan kewenangan pada masing-masing pengurus yang telah direkrut dalam partai politik disusun serta diatur menurut sistem manajemen organisasi yang merupakan ketetapan partai.

Hal ini menegaskan proses rekrutmen bukan hanya tertuju pada penempatan orang-orang yang akan duduk dilembaga pemerintahan saja namun juga untuk menempatkan orang-orang yang mampu baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mengisi peran-peran

mereka di partai politik, yang pada akhirnya mereka tersebut bisa memainkan peran-peran politik mereka.

Menurut Firmanzah (2007:92) mengemukakan rekrutmen politik adalah:

“Cara melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan menjadi pengurus partai politik harus diubah dan lebih berorientasi pada masalah bangsa dan negara. Selain itu, proses pengkaderan dan muatan-muatan politis yang diberikan kepada mereka harus diubah. Perlu ditanamkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari bangsa dan negara, dan bahwa di pundak mereka terdapat segudang permasalahan bangsa dan negara yang harus diselesaikan”.

Pendapat diatas tentu sangat relevan dengan kondisi sekarang ini, dimana partai politik dalam merekrut kadernya jangan hanya memikirkan sebatas pada popularitas calon kader tersebut namun yang paling penting bagaimana seorang kader tersebut mampu dan mengerti akan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi sehingga keberadaan sebuah partai politik tidak hanya sebatas syarat bagi sebuah negara demokrasi namun sudah menjadi pilar penting.

Surbakti dalam Hesel Nogi Tangkilisan, (2003:188). juga mengemukakan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. (Ramlan Surbakti, 1999:188), Mochtar Mas'oeed mengemukakan bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkn diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.

Dari beberapa teori tentang rekrutmen diatas, teori yang digunakan penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Lester G Seligman, yang memfokuskan pada sifat pengkrerutmen yang akan di teliti.

Menurut Seligman (1989:15-16). Sistem rekrutmen politik dibagi menjadi dua cara:

1. Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi

jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.

2. Rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintahan. Dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

Menurut Seligman (1989:15-16), di atas rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting yaitu:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai ditingkat lokal atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat cabang daerah.
3. Penetapan calon. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

Ketiga tahapan ini dijalankan secara berbeda-beda disetiap partai politik disesuaikan dengan *platform* dan aturan main dari partai politik yang bersangkutan. Akibatnya, derajat demokratisasi partai politik turut menentukan kualitas calon kandidat.

b. Proses Rekrutmen

Proses rekrutmen akan menjadi lebih demokratis dan terbuka, ketika ada perubahan Undang-Undang baik secara substansi maupun sistimnya kearah yang lebih baik. Sekarang ini proses rekrutmen pejabat publik (pemilihan kepala daerah) sudah dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga akan memperoleh pejabat publik yang lebih berkualitas, aspiratif dan representatif dibanding selama ini yang selalu menimbulkan konflik berkepanjangan setelahnya. Oleh sebab itu persyaratan yang lebih ketat dalam penentuan calon pejabat publik (kepala daerah) sebagai penyelenggara pemerintahan menjadi sangat strategis dalam proses rekrutmennya. Marniati, (2009)

rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting yaitu:

1. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai ditingkat lokal atau ranting partai dengan elit partai di tingkat atasnya atau anak cabang.

2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat cabang daerah.
3. Penetapan calon. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Politik.

a. Faktor Penghambat

Dalam kaitannya dengan Rekrutmen Pejabat Publik yang sedang dan akan terus-menerus berlangsung, maka sangat mendesak untuk mengubah paradigma penilaian kualitas SDM calon aktor Publik (Pasangan Kepala Daerah) tersebut, menurut Hasibuan dalam Selgman (1987) ada dua indikator yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen yaitu:

1. indikator “topeng” yaitu, (gelar akademik, jabatan publik dan kekayaan atau *money politic*),
2. indikator “kinerja” atau *trade record*. Caranya dengan melihat kualitas manusia secara hakiki dan lebih substantif, seperti hasil karya, prestasi di masyarakat, sikap dan perilakunya selama ini.

b. Faktor Pendukung

Ada beberapa hal yang dapat mendukung dalam proses rekrutmen politik atau calon Kepala Daerah adalah, menurut Czudnowski dalam Tricahyono (2005) yaitu:

1. *Social background* : Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit dibesarkan.
2. *Political socialization* : Merupakan suatu proses yang menyebabkan seorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik.
3. *Initial political activity* : Faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.
4. *Apprenticeship* : Faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit yang lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
5. *Occupational variables* : Calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dalam kualitas kerjanya.
6. *Motivations* : Orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal

yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik. Selection : Faktor ini menunjukkan pada mekanisme politik yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana metode yang digunakan menekankan pada proses penelusuran data/informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatu interpretasi.. Menurut Maleong (2001:3) penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan kaitan dengan Rekrutmen Calon Kepala Daerah Melalui Partai Politik dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Baubau. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, Menurut Sanapiah (1999:20) deskriptif yaitu untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti.

Tujuan Penelitian deskriptif (*Descriptive Research*) adalah untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau Daerah tertentu” (Sumardi, 1983:75). Penelitian deskriptif dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, suatu penelitian yang berusaha, menjawab,(Sugiono 1998:6).

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

a. Observasi

Pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Bungin (2012:115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, tidak terstruktur dan kelompok tidak terstruktur. Berdasarkan pendapat di atas maka jenis observasi Dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, karena peneliti tidak terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas informan. Adapun hal-hal yang diobservasi adalah

1. Melihat calon yang akan direkrut melalui Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Konsolidasi proses rekrutmen Partai Amanat Nasional (PAN)
3. Pola komunikasi antar pengurus Partai dalam merekrut calon kandidat
4. Hubungan Pimpinan Partai dengan Pimpinan Partai yang lain.

c. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan para informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:226) antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan. Adapun informan yang di maksud dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Baubau
 2. Anggota-Anggota DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Baubau
 3. Masyarakat
- Adapun hal-hal yang di wawancarai adalah

1. Terkait dengan keadilan dalam proses rekrutmen
2. Terkait dengan transparansi/terbuka dalam proses rekrutmen
3. Terkait dengan proses Demokratisasi dalam proses Rekrutmen pemilihan Kepala Daerah.

C. Analisis Data

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Baubau dalam hal ini Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN), serta beberapa instansi terkait yang memiliki hubungan dengan Rekrutmen Calon Kepala Daerah Melalui Partai Politik (PAN).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa, pembahasan dalam proses rekrutmen Calon Kepala Daerah melalui partai politik (PAN) Kota Baubau Sulawesi Tenggara Tahun 2012, sudah berjalan dengan optimal dan sudah terpenuhi melalui Tahapan-tahapan Rekrutmen seperti, Penjaringan Calon, Penyaringan dan Seleksi Calon, dan sampai Penetapan Calon.

Meskipun ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut, yaitu (1) terjadinya perpecahan didalam partai itu sendiri dalam mengusung calon, dari ketidak kompakannya tersebut terjadilah dualisme karena adanya kepentingan di masing-masing pengurus, (2). Adanya penekanan dari wilayah untuk membuka penjaringan, (3). Dilihat dari gelar akademik, mempunyai kekayaan (finansial), mempunyai jabatan tinggi dari birokrasi (Indikator Topeng), (4). Dilihat dari kualitas pengalaman kerjanya, dan mempunyai prestasi pada masyarakat setempat dan sekitarnya (Indikator Kinerja). Meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses rekrutmen calon kepala daerah Kota Baubau diatas namun ada faktor yang mendukungnya yaitu, (1). Dukungan pengurus partai amanat nasional yang dari DPD, DPW, dan DPP, (2). Tim-tim dari pemenang dari luar yang mampu meyakinkan calon tersebut, (3). Tim seleksi melihat dari *socil backgroundnya* calon yaitu dari keluarga yang mempunyai kemampuan untuk maju menjadi calon Kepala Daerah (finansial) dan dari keluarga elit, (4). Tim seleksi melihat calon dari seorang *figure* dalam birokrasi atau pemerintahan, (5). Bakal calon tersebut mempunyai motivasi untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau sehingga mempunyai visi-misi yaitu Kota Baubau menjadi Daerah Otonom di kawasan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

IV. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Proses Rekrutmen

Berdasarkan pembahasan hasil dan penelitian yang telah diuraikan pada Bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa proses rekrutmen calon Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2012 untuk periode Tahun 2013-2018 mendatang, tidak adanya penyeleksian calon Kepala Daerah Kota Baubau

kepada kader atau pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) yang di usung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sendiri, karena kader-kader partai yang lain tidak masuk dalam persyaratan dan prosedur yang partai amanat nasional telah sediakan. Sehingga partai amanat nasional Kota Baubau hanya mengambil satu nama yaitu Bapak Tamrin sebagai Bakal Calon Kepala Daerah Kota Baubau dalam pemilihan tahun 2012 untuk periode 2013-2018 mendatang. Dalam proses rekrutmen Calon Kepala Daerah Kota Baubau yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Baubau mengadakan beberapa tahap untuk masuk kategori dalam pencalonan Bakal Calon Kepala Daerah Kota Baubau, yaitu yang menjadi inti pentahapan adalah sebagai berikut:

1. Prinsip umum yang mendasari rekrutmen politik partai ini sesuai dengan prinsip kelahirannya yaitu pembentukan partai dalam melakukan perbaikan pada sistem politik dan pemerintahan. Ada 3 tahapan yang di lakukan oleh partai amanat nasional yaitu tahapan penjaringan calon, tahapan penyaringan dan seleksi calon, tahapan penetapan calon.
2. Selain dalam undang-undang ada tiga Pertimbangan partai amanat nasional dalam menentukan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah :
 - a. Dukungan politik adalah dukungan partai politik, dapat memenuhi kekurangan suara partai amanat nasional untuk mengusung satu pasangan calon.
 - b. Dukungan sosial adalah bahwa bakal calon harus cukup di kenal di masyarakat, tidak hanya orang sekitarnya saja.
 - c. Dukungan finansial adalah dukungan pendanaan yang di gunakan saat melakukan sosialisasi dan pelaksanaan pemilukada.
3. Partai amanat nasional sebagai partai menengah yang cukup berprestasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah tidak menggunakan aturan baku. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional adalah sistem rekrutmen terbuka.
4. Proses pengambilan keputusan rekrutmen politik bakal calon Walikota dan Wakil Walikota di lakukan dengan membentuk tim khusus yang berfungsi menyeleksi dan menjalin komunikasi dengan beberapa bakal calon, Tim penyeleksi melakukan penyeleksian dan komunikasi politik dengan bakal calon untuk mendapatkan Satu nama saja bakal calon terbaik dari yang ada. Setelah melakukan komunikasi dan pendekatan kepada bakal calon Walikota, Dewan Pimpinan Daerah melaksanakan rapat dengan struktur partai. Hasil rapat dengan seluruh struktur partai terpilihah hanya satu nama kandidat yang akan di sampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui

Dewan Pimpinan Wilayah. Melalui beberapa pertimbangan dan masukan-masukan dari pengurus partai di Daerah Dewan Pengurus Pusat menetapkan satu nama calon yang akan diusung oleh Partai Amanat Nasional yaitu Bapak Drs. A. S. Tamrin, MH dalam pemilukda Kota Baubau Tahun 2012 periode Tahun 2013-2018 mendatang.

B. Faktor Penghambat.

Adapun faktor penghambatnya dalam proses rekrutmen calon Kepala Daerah Kota Baubau yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Baubau pada pemilihan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a). Adanya terjadinya perpecahan dalam partai itu sendiri dalam mengusung calon, dari ketidakkekompakan tersebut terjadilah dualisme, karena adanya kepentingan dimasing-masing pengurus. (b). Adanya penekanan dari wilayah untuk membuka penjangkaran. (c). Melakukan dilihat dari gelar akademik, mempunyai kekayaan (finansial), mempunyai jabatan tinggi dari birokrasi (Indikator "Topeng"). (d). Dilihat dari kualitas pengalaman kerjanya, dan mempunyai prestasi pada masyarakat setempat dan sekitarnya (Indikator "Kinerja").

C. Faktor Pendukung.

Selain mempunyai faktor penghambat diatas ada juga faktor pendukungnya dalam proses rekrutmen tersebut. Proses rekrutmen calon Kepala Daerah Kota Baubau pada pemilihan Tahun 2012 yaitu sebagai berikut:

- a). Dukungan pengurus partai amanat nasional yang dari DPD, DPW, dan DPP. (b). Tim-tim pemenang dari luar yang mampu meyakinkan calon tersebut. (c). Tim seleksi dilihat dari *social backgroundnya* calon yaitu dari keluarga yang mempunyai kemampuan untuk maju menjadi calon Kepala Daerah (finansial), dan dari keluarga elit. (d). Tim seleksi melihat calon seorang figure dalam birokrasi atau pemerintahan. (e). Bakal calon tersebut termotivasi untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau sehingga mempunyai visi-misi yaitu Kota Baubau menjadi Daerah otonom di kawasan Daerah provinsi Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- [I]. Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, (aktualisas, Metodologis kearah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- [II]. Czudnowski dalm Tricahyono, l. *Reformasi Pemilu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005
- [III]. Fahrurrozi, M. (2013). *Rekrutmen Politik Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Partai Keadilan Sejahtera di Kota Pekanbaru Tahun 2011*.

- [IV]. Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- [V]. Indriani, E. A., & Tinov, M. T. (2015). *rekrutmen bakal calon kepala daerah provinsi riau oleh partai keadilan sejahtera dalam pemilihan umum kepala daerah provinsi riau tahun 2013*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 1-15.
- [VI]. Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- [VII]. Lincoln, Yvona S, dan Egon G, Guba, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills : Sage Publications, 1985.
- [VIII]. Marniati, 2009. *Pengertian Budaya Politik Indonesia*. Prakarsa Jakarta.
- [XIII]. Maleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif, -Cet.1*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- [X]. Rahman, Abdul H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [XI]. Sanapiah, Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Gramedia, 1999.
- [XII]. Seligman, Lester G. *Perekrutan Kaum Elit dan Pembangunan Politik" dalam Elit dan Modernisasi (ed/Aidit dan Zainal AKSP. (Yogyakarta:Liberty,1989)Hlm.15-16*.
- [XIII]. Subakti dan Nogi, Hesel Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset.
- [XIV]. Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 1998
- [XV]. Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- [XVI]. Stiftung. 2001. *Partai dan Kita, Petunjuk Praktis memahami Partai Politik*. Jakarta : IPCOS.
- [XVII]. ¹ Rekrutmen Calon Kepala Daerah Melalui Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2012
- [XVIII]. (Jurnal Dirjen Otonomi Daerah, 28 juni 2006.) Diakses, tgl 2 maret, 2015.
- [XVIII]. (<http://kpu.baubaukota.go.id>).

[XXI]. *MahkamahKonstitusi.go.id*). diakses tanggal 29 juni 2015, pukul 2:54

[XXII]. *Kendari-pos 2013*). Diakses, tgl 17 juni 2015, pukul 11:02.